

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. *Agency Theory*

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), *agency theory* adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*, *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dan *principal* kepada *agent*. *Principal* adalah investor atau *stakeholder*, *agent* adalah manajer. *Agency theory* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer sebagai pihak internal perusahaan dengan investor sebagai pihak eksternal perusahaan. Manajer bisa bersifat oportunistic dengan menyalahgunakan laporan keuangan terutama bagian laba dengan memaksimalkan atau meminimumkan laba. Selain itu, manajer juga bisa menyembunyikan informasi penting untuk *stakeholder* perbankan, contohnya mutasi kredit, tingkat bunga, dll. Hal ini dikenal juga dengan sebutan asimetri informasi. Sementara jika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama, maka manajer akan bertindak untuk kepentingan investor. Tipe-tipe *agency problem* antara lain (Panda dan Leepsa, 2017):

##### 1. Tipe 1 (*Principal-Agent Problem*)

Permasalahan terjadi antara pemilik (*investor*) dan manajer di organisasi disebabkan oleh pemisahan kepemilikan atas kontrol perusahaan (Berle dan Means, 1932). Pemilik menugaskan manajer

untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk keuntungan pemilik.

2. Tipe 2 (*Principal-Principal Problem*)

Tipe dua ini diasumsikan bahwa adanya *agency problem* dikarenakan adanya konflik antara mayoritas pemegang saham dan minoritas pemegang saham perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa pemegang saham yang lebih besar (mayoritas) memiliki hak yang lebih besar daripada pemegang saham yang lebih kecil (minoritas).

3. Tipe 3 (*Principal-Creditor Problem*)

Konflik antara pemilik dan kreditor muncul karena keputusan-keputusan yang dilakukan dan keputusan keuangan yang diambil oleh *shareholder* (Damodaran, 1997). Dimana *shareholder* mencoba untuk menginvestasikan uang mereka untuk sesuatu yang lebih beresiko (*risk-taker investor*), dan investor berharap pada *return* yang tinggi pula. Resiko itu bisa menyebabkan meningkatnya biaya-biaya keuangan dan menurunkan nilai hutang yang akan berdampak pada kreditor.

## 2.2. Teori Akuntansi Positif

Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan terhadap teori akuntansi normatif (Watts dan Zimmerman, 1981). Teori akuntansi positif digunakan untuk menjelaskan praktek akuntansi di masa yang akan datang. Menurut Watts dan Zimmerman (1981), terdapat tiga alasan terjadinya pergeseran teori akuntansi normatif ke teori akuntansi positif, yaitu:

1. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
2. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
3. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa sistem perekonomian yang berdasarkan pada mekanisme pasar, informasi akuntansi dapat menjadi kendali bagi masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien.

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) terdapat tiga hipotesis dari teori akuntansi positif, antara lain:

1. Hipotesis rencana bonus (*Bonus Plan Hypothesis*)

Dengan adanya rencana bonus, manajer perusahaan akan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan dengan adanya keuntungan yang cukup tinggi, manajer akan mendapatkan bonus juga.

2. Hipotesis Kontrak Hutang (*Debt Equity Hypothesis*)

Hipotesis ini memprediksikan bahwa semakin tingginya *Debt to Equity Ratio* (DER), maka semakin seringnya manajer menggunakan metode akuntansi untuk meningkatkan laba bersih

### 3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Semakin besar biaya politik perusahaan, maka manajer cenderung akan menggunakan metode akuntansi yang akan menurunkan laba di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar biaya politik (pajak) untuk perusahaan akan lebih kecil.

### 2.3. *Self Assessment Corporate Governance*

Sesuai dengan namanya, *self-assessment* berarti penilaian sendiri. Menurut Supriyatno (2000), *corporate governance* adalah:

“Proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stockholder* yang lain”.

Jadi, *self assessment corporate governance* adalah menilai sendiri tata kelola yang ada di perbankan. Sesuai diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi. Periode penilaian tingkat kesehatan bank wajib dilakukan paling sedikit setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Penilaian kesehatan bank wajib dilakukan karena dilandaskan pada lima asas *good corporate governance*. Menurut KNKG (2006), lima asas *good corporate goveranance* yaitu:

### 1. Transparansi (*Trasnparency*)

Untuk menjaga objektivitas bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan juga harus mengungkapkan hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- c. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan perlu dikelola dengan benar, sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.

### 3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran, dan peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaannya antara lain:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pelaksanaannya antara lain:

- a. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan

- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, penilaian terhadap penerapan tata kelola yang berlandaskan lima asas dasar tata kelola yang baik dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari tiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian *governance structure* berujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk dapat menghasilkan *outcome* sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank. Yang termasuk dalam struktur adalah organ-organ dalam bank itu sendiri, sebagai contoh direksi, dewan komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada bank. Sementara yang termasuk dalam infrastruktur antara lain kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, dan fungsi pokok masing-masing struktur perbankan.

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang sudah didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur perbankan, dari *governance process* dihasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan bank.



Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan bank yang merupakan hasil proses penerapan tata kelola yang baik yang didukung dengan adanya kecukupan struktur dan infrastruktur perbankan. Yang termasuk *governance outcome* antara lain:

1. Kecukupan transparansi laporan,
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
3. Perlindungan konsumen,
4. Objektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit,
5. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, dan/atau
6. Peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank, seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **2.3.1. Faktor-Faktor Penilaian *Corporate Governance* Perbankan**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, terdapat 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris (bobot 10%)
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi (bobot 20%)
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (bobot 10%)
4. Penanganan benturan kepentingan (bobot 10%)

5. Penerapan fungsi kepatuhan (bobot 5%)
6. Penerapan fungsi audit internal (bobot 5%)
7. Penerapan fungsi audit eksternal (bobot 5%)
8. Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian internal (bobot 7.5%)
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*) (bobot 7.5%)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal (bobot 15%), dan
11. Rencana strategis bank (bobot 5%)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola bank yang mencakup hal-hal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik paling sedikit diwujudkan dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris,
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern,
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern,
4. Penerapan manajemen resiko.

#### **2.4. Manajemen Laba**

Menurut Fischer dan Rosenzweig (1995), manajemen laba ialah tindakan manajer yang menaikan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang

menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba berlangsung dikala manajer memfungsikan *judgement* (penilaian) di dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan. Menurut Scott (2003), tujuan manajemen laba yaitu:

### 1. *Bonus Purposes* (Tujuan Bonus)

Pencapaian laba di perusahaan adalah salah satu pengukuran bagaimana kinerja manajemen. Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba.

Menurut Sulistiawan, *et al* (2011), pemegang saham akan memberikan bonus atau insentif sebagai *feedback* atau evaluasi terhadap kinerja manajer dalam menjalankan perusahaan. Dan bonus yang diberikan pemegang saham akan besar jika kinerja dari manajer baik yang hal ini dilihat dari seberapa laba dari perusahaan itu.

### 2. *Taxation Motivation* (Motivasi Perpajakan)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang nyata. Menurut Sulistiawan, *et al* (2011), perusahaan akan cenderung menyajikan laporan keuangan fiskal yang lebih rendah dari yang sebenarnya, hal ini akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya pajak rendah.

### 3. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonusnya sebelum masa pensiun dan apabila kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak dipecat.

4. *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Saham Perdana  
Perusahaan yang akan *go-public* belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer melakukan manajemen laba dengan harapan bisa menaikkan harga saham perusahaan. Sementara menurut Sulistiawan *et al* (2011), kegiatan manajemen laba pada saat IPO tidak bertujuan untuk meningkatkan harga saham. Namun, dengan laba atau kinerja perusahaan yang terlihat baik, para investor akan tertarik ke perusahaan itu.

#### 2.4.1. Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2003), terdapat beberapa pola manajemen laba, diantaranya:

##### 1. *Taking a Bath*

Dalam pola ini, manajemen akan menghapus beberapa aktiva dan membebaskan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. Manajer juga akan melakukan *clear the desk* (atau menyembunyikan bukti yang ada) sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan

datang meningkat (menjadi lebih baik). Selain itu menurut Sulistiawan, *et al* (2011), jika perekonomian sedang tidak baik, manajer akan cenderung menurunkan laba perusahaan dan melaporkan adanya kerugian, hal ini agar pada periode selanjutnya manajer dapat melaporkan laba sesuai target.

## 2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan dengan mengubah laba perusahaan menjadi lebih rendah agar tidak mendapat perhatian secara politis, yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan perusahaan.

## 3. *Income Maximization*

Pola manajemen laba ini berkebalikan dengan *income minimization*. Pola ini dilakukan dengan cara memaksimalkan laba, tujuannya adalah untuk memperoleh bonus yang lebih besar bagi manajer perusahaannya. Selain itu, dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mudah menarik para investor untuk berinvestasi di perusahaan itu.

## 4. *Income Smoothing*

Pola ini dilakukan dengan cara melaporkan *trend* pertumbuhan laba yang stabil. Pola dengan laba yang stabil, akan menarik investor dengan tipe *risk averse* (investor yang menghindari adanya resiko). Menurut Sulistiawan *et al* (2011), makin fluktuatif laba, perusahaan dapat

dikatakan beresiko, begitu pun dengan harga saham, harga yang fluktuatif juga mencerminkan bahwa saham itu beresiko.

#### 5. *Timing Revenue dan Expenses Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi ataupun mengubah metode akuntansi, contohnya seperti pengakuan *premature* pendapatan, metode penyusutan aset tetap (apakah menggunakan metode garis lurus atau menggunakan saldo menurun).

#### 2.4.2. Faktor Pendorong Manajemen Laba

Menurut Watts dan Zimmerman (1981), ada tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi manajemen laba, diantaranya:

##### 1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan cenderung memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi menandakan kinerja manajer baik, maka bonus yang diterima manajer itu akan lebih banyak atau bertambah.

##### 2. *Debt Covenant Hypothesis*

Manajemen yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode yang dapat meningkatkan laba. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga reputasi dalam pandangan pihak eksternal. Dengan

peningkatan laba atau laba yang terlihat baik, manajer akan cenderung menarik para kreditur untuk menginvestasikan dananya di perusahaan itu.

### *3. Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Dengan adanya laba yang tinggi, maka pemerintah akan mengambil tindakan seperti menaikkan pajak pendapatan perusahaan.

## **2.5. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Jasman (2015) melakukan penelitian tentang “Manajemen Laba: Bukti Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Variabel independen yang digunakan adalah efektivitas dewan komisaris, efektivitas komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan saham publik. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Objek yang digunakan adalah perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2013. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perbankan. Kepemilikan publik tidak berpengaruh juga terhadap manajemen laba pada perbankan, sementara kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada perbankan.

Zeptian (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perbankan (Studi Empiris pada Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 - 2010)”. Variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Objek yang digunakan adalah perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2010. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba perbankan syariah Indonesia. Komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dewi dan Khoiruddin (2014) melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Masuk dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) Tahun 2012 - 2013”. Variabel independen yang digunakan adalah *good corporate governance* dengan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Objek yang digunakan adalah perusahaan yang masuk dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) tahun 2012 - 2013. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya



dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.

Astuti dan Nuraina (2017) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba”. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Objek yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2013 - 2015. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba perbankan. Sementara *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba perbankan.

Aprina dan Khairunnisa (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Perdagangan, Jasa, dan Investasi Sub Sektor Perdagangan Eceran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014)”. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kompensasi bonus. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba. Objek yang digunakan adalah perusahaan perdagangan, jasa, dan investasi sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2014. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan

terhadap manajemen laba. Sementara kompensasi bonus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

## **2.6. Pengembangan Hipotesis**

### **2.6.1. Pengaruh *Self Assessment Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Perbankan**

*Self assessment corporate governance* adalah penilaian sendiri tata kelola perusahaan perbankan. Manajer menilai sendiri bagaimana tata kelola perbankan dijalankan dengan cara membandingkan apakah tujuan perbankan yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kegiatan operasionalnya. Manajer perbankan juga menetapkan nilai komposit sesuai kriteria-kriteria dalam kertas kerja penilaian *corporate governance* dan kemudian memberikan peringkat kompositnya. Lalu manajer perbankan akan melaporkan hasil penilaian *corporate governance*-nya ke Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pengawas akan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian bank tersebut (apakah penilaian *corporate governance* tersebut sudah menggambarkan keadaan bank yang sebenarnya atau belum). Peringkat komposit hasil penilaian *corporate governance* perbankan terbagi menjadi lima penilaian, yaitu peringkat 1 (yang berarti *corporate governance* perbankan dijalankan dengan sangat baik), peringkat 2 (yang berarti *corporate governance* perbankan dijalankan dengan baik), peringkat 3 (yang berarti *corporate governance* perbankan dijalankan dengan cukup), peringkat 4 (yang berarti

*corporate governance* perbankan dijalankan dengan kurang baik), dan peringkat 5 (yang berarti *corporate governance* perbankan dijalankan dengan tidak baik).

Dengan begitu, semakin baik *corporate governance* dijalankan di perbankan, dicerminkan dengan semakin rendahnya hasil peringkatnya.

*Corporate governance* yang semakin baik akan meningkatkan kegiatan *monitoring* yang dapat meminimalkan praktek manajemen laba perbankan.

Dengan perilaku manajemen laba yang semakin berkurang, berarti manajer perbankan akan lebih mementingkan kepentingan *stakeholder* daripada kepentingan pribadinya untuk bersikap oportunistis. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H1: *Self Assessment Corporate Governance* berpengaruh positif**

terhadap manajemen laba perbankan